

Korupsi di Masa Pandemi



Yemiko Happy
Lapor Covid 19

Covid and Corrupt is Disaster

- Pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari masyarakat. Upaya-upaya pemerintah untuk melakukan mitigasi risiko nyatanya tidak berjalan dengan baik.
 - Program-program pemerintah untuk penanganan pandemi selalu diwarnai oleh tindakan *fraud*.
 - Pada program JPS, yang sudah diberikan oleh pemerintah, nyatanya menimbulkan banyak masalah. Masalah dari hulu hingga hilir, pendataan sampai kualitas belum diselesaikan secara tuntas.
 - Hal yang sama juga terjadi dalam proses vaksinasi.
- 

01

Paradigma

Masa darurat bukan alasan ketiadaan transparansi



Our history

Korupsi APD di Sulsel

Hanya 1000 APD
disalurkan dari
4000 APD



Korupsi Dana Bansos

Suap sebesar 32 M

Korupsi Alkes RS UNAIR

Kerugian
Rp14.139.223.215



Korupsi Masker Dinkes Banten

Kerugian 3,3 M



Pandemi adalah masa krisis, masa dimana semua ketidaksiapan dan ketidakmampuan bangsa ini bertemu.

Keadaan ini menuntut segala jenis pengadaan dengan cepat dan fleksibel.

Perlakuan pemerintah dalam mengelola keadaan ini harus transparan. Sehingga apa yang diambil oleh pemerintah memainkan peran penting untuk mencegah darah tertumpah

Tapi Nyatanya....

3.686.740 orang
terinfeksi Covid-19

108.571 orang
meninggal dunia

1808 tenaga kesehatan meninggal

640

Dokter

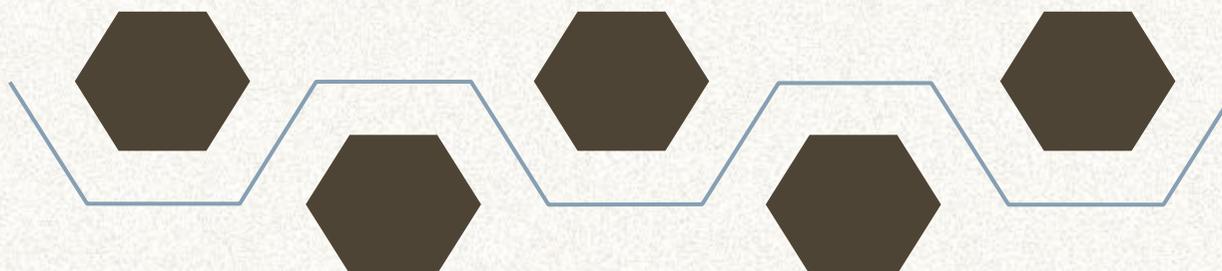
594

Perawat

331

Bidan

3007 orang meninggal di luar Rumah Sakit



Mengorupsi Hak Asasi

02

Semua orang ingin
bertahan hidup, tapi
koruptor merampasnya



Rekapitulasi Laporan Bansos

Jenis Bansos

38.2% **BST**
Menjadi laporan
terbanyak

22.8% **Bansos Lain**
Bantuan isoman, kuota
belajar, dll

Kategori lain

19.5%

BPUM

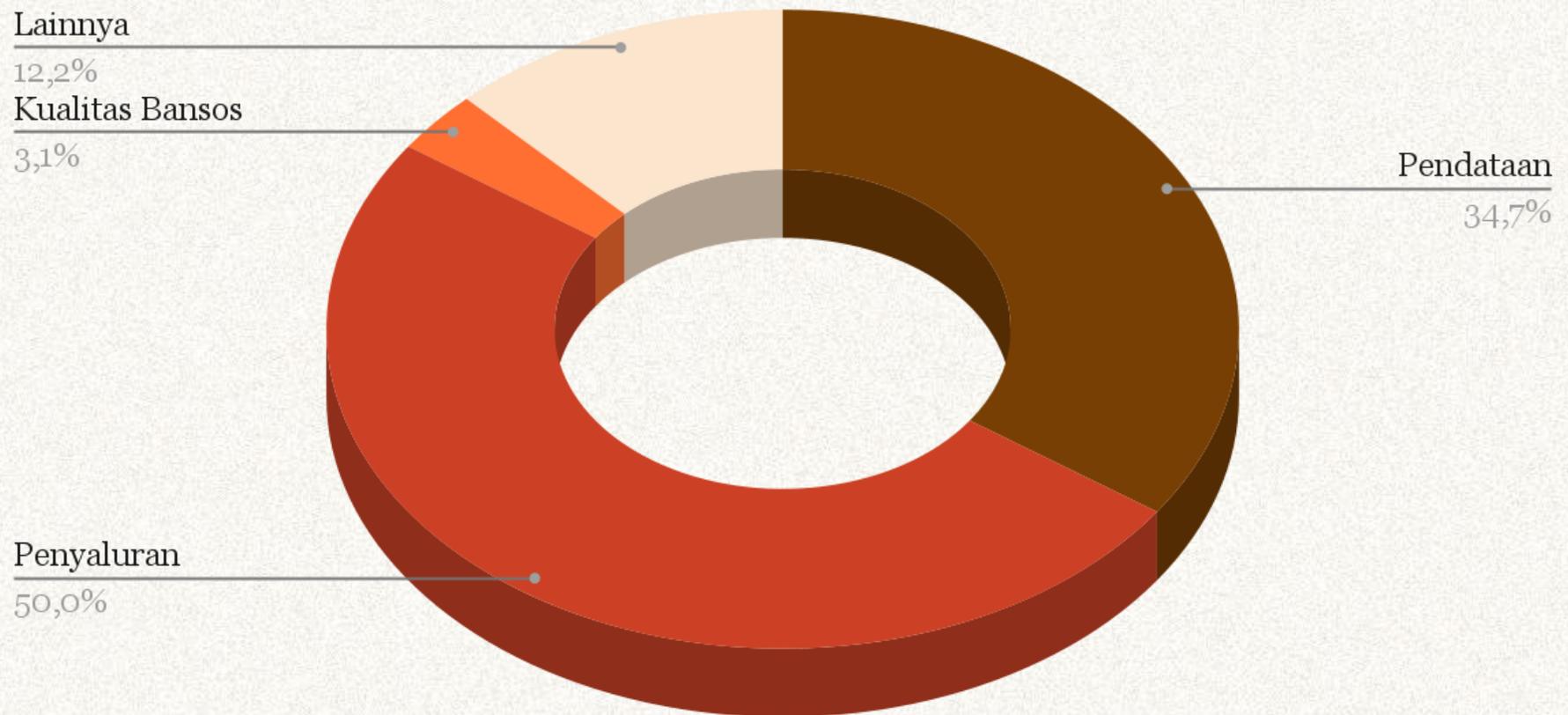
17.6%

**Bantuan
Sembako**

1.8%

**Bantuan
listrik**

Persoalan Utama Bansos



Laporan Bansos



Bansos pertama kali turun April 2020. Ada 306 laporan Bansos yang dilaporkan ke LC19.

Laporan itu meliputi:

- Data tidak sesuai
- Pemotongan
- Politisasi
- Salah sasaran
- Pungli
- Tidak layak konsumsi, dll

Banyak laporan tidak direspon dengan baiknya sistem pelaporan oleh pemerintah. LC19 sangat kesulitan untuk melaporkan laporan bansos langsung ke pihak yang berkaitan.

Contoh Laporan Warga

Karawang, 30 Juli 2021

Saya mengeluhkan bantuan bansos sebesar 600rb oleh pihak pengurus bansos di daerah saya kenapa dipotong 350rb, itu menurut saya nominalnya tidak masuk akal, apalagi alasannya untuk dikasih ke warga lain yang tidak mendapatkan bansosnya

Kuningan, 23 Juli 2021

Saya sudah mendaftar bansos UMKM ke desa dari tahun kemarin, kata desa didatangi dulu tapi sampai skrg gak ada kabar lagi. Saya usaha jualan sosis bakar dirumah . Dan tetangga saya ya gak jualan gak punya usaha tapi bisa dapat bansos umkm. kenapa Admin? Dan saya pun ingin menanyakan bantuan BPNT. Di data DTKS nama saya ada dan bantuan tersebut sudah dibagikan bulan mei-juni tapi sampai sekarang saya tidak menerima bantuan tersebut.

Deli Serdang, 19 Juli 2021

Kualitas bantuan sosial BPNT telur tidak standar, ukuran kecil dan untuk ayam tidak sesuai timbangan yang seharusnya 1kg menjadi 9 ons dan kebanyakan tulang bukan dagingnya

Upaya Mitigasi Risiko Korupsi



Kawal proses penyaluran ini agar cepat, tepat sasaran, dan diawasi tidak ada potongan-potongan apapun sehingga dampak ekonominya segera bisa muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama

Isu Utama Bansos

Integrasi DTKS

Memastikan semua
data terpadu

Ketepatan Sasaran

Pemda melakukan
pemeriksaan DTKS
existing

Tantangan Daerah 3T

Distribusi langsung
kepada penerima

Pengawasan Birokrasi

Penguatan regulasi dan
pengadaan sanksi tegas

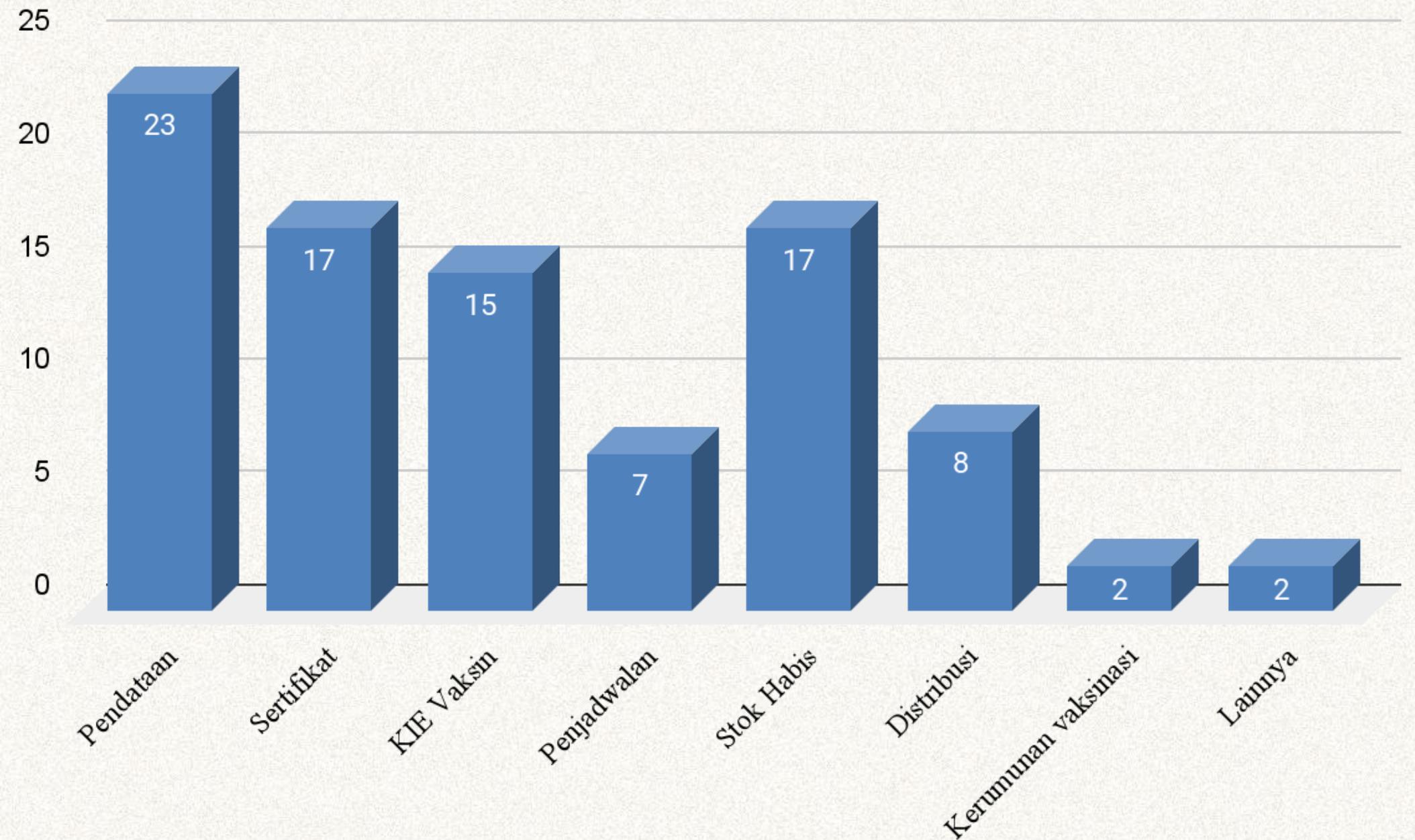


03

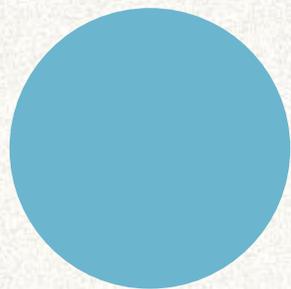
Potensi Korupsi dalam Vaksinasi

Korupsi vaksinasi sama dengan memperlama pandemi

Vaksinasi pada bulan Juli

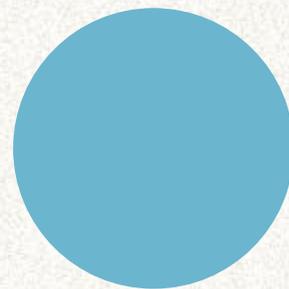


Potensi *Fraud* Vaksinasi



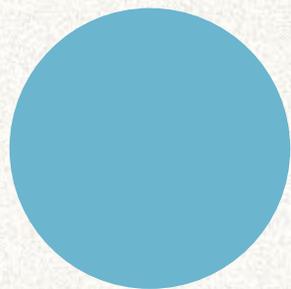
Pungli

Pungli bagi masyarakat yang ingin divaksinasi



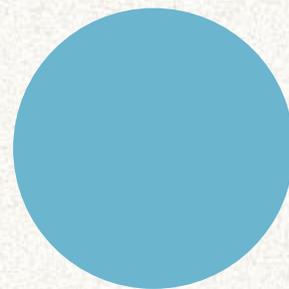
Sertifikat Palsu

Sertifikat vaksin tanpa vaksinasi



Penggunaan NIK orang lain

Penggunaan identitas orang lain tanpa izin



Pengadaan oleh Sentra

Kemenkes langsung memberikan vaksin kepada penyelenggara



Contoh Laporan Warga

Kab. Cianjur, 03 Agustus 2021

Ditempat saya vaksin berbayar, yang mau vaksin diminta uang Rp. 300.000

Kab. Badung, 28 Juli 2021

“Kawan saya mendapatkan sertifikat vaksin asli walaupun dia tidak disuntik vaksin covid. Kawan saya dibantu oleh seorang temannya yang seorang petugas instansi kesehatan di puskesmas tersebut. Kawan saya tidak disuntik vaksin, namun sertifikat terbit seperti asli. Ironisnya oknum pembuat sertifikat ini juga mempraktekkan hal yang sama terhadap dirinya.”

Kab. Tangerang, 27 Juli 2021

“Halo saya mau lapor Data NIK saya digunakan seseorang untuk vaksin, padahal saya belum [dapat] vaksin. Akibatnya saya tidak bisa divaksinasi. Saya sudah menanyakan ke tempat vaksin tsb dan tidak diketahui oknum yg memakai data saya. Dari puskesmas yg tertulis juga tidak ada bantuan apa2. Jelas hanya menggunakan fc ktp saya orang tsb lsg bisa divaksin.”



Thanks!

Do you have any questions?



@laporcovid19



Koalisi Warga LaporCovid19



@laporcovid

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon and infographics & images by Freepik